

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Suatu kondisi yang terkait dengan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi kesehatan, pangan, sandang, papan serta pendidikan biasa disebut dengan istilah kemiskinan. Langkanya alat pemenuhan kebutuhan dasar serta beberapa hal lain seperti akses yang susah dalam menempuh pendidikan dan juga pekerjaan merupakan penyebab dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan sendiri dianggap sebagai masalah global. Dimana beberapa orang memiliki pemahaman dan penglihatan yang berbeda-beda terkait kemiskinan ini, seperti pemahaman secara subyektif dan komparatif, pemahaman melalui sudut ilmiah yang telah mantap, serta penglihatan berdasarkan segi moral dan evaluatif.²¹

Selain itu kemiskinan juga dianggap sebagai masalah yang memiliki sifat multidimensi dalam suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan untuk menangani permasalahan yang terjadi setidaknya

²¹ M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 01 No. 01, 2017, hlm. 117

harus menyertakan preferensi, nilai serta politik, dan bukan hanya mengaitkannya pada hubungan sebab akibat munculnya kemiskinan saja.²² Kemiskinan menjadi permasalahan struktural dan juga bersifat multidimensi, jadi secara umum masyarakat miskin merupakan suatu keadaan masyarakat yang berada pada sebuah situasi yang tidak terlalu menguntungkan dikarenakan terjadinya kerentanan, ketidakberdayaan, keterasingan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.²³

Chambers mengutarakan jika

Kemiskinan merupakan suatu konsep integrasi, yang mana didalamnya terdapat lima dimensi yang meliputi: kemiskinan, ketidakberdayaan, sensitivitas dalam mengatasi keadaan darurat, ketergantungan, serta keterasingan secara geografis ataupun secara sosiologis. Tidak hanya kekurangan uang serta rendahnya tingkat pendapatan yang terjadi dalam kehidupan kemiskinan, namun terdapat beberapa hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan kemiskinan seperti halnya berkenaan dengan tingkat kesehatan, rendahnya pendidikan, ketidakadilan oleh suatu hukum, rentannya ancaman tindak kriminal, ketidakmampuan dalam melawan kekuasaan, serta ketidakmampuan untuk menetapkan jalan kehidupannya sendiri.²⁴

b. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Al-Ghazali (1980) mendefinisikan

Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan dalam memenuhi apa yang tidak mereka butuhkan bukanlah sebuah kemiskinan. Apabila barang yang dibutuhkan

²² Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Ed. 01, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1

²³ Alifiulahtin Utaminingsih dkk., *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, Cet. 1, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 1

²⁴ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin...*, hlm. 2

tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tentu tidak akan diperlakukan sebagai selayaknya orang miskin. Al-Ghazali juga membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu: 1) kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan materil dan 2) kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani.

Rehman (1980) berpendapat bahwa

Umat Islam bisa melakukan peningkatan pada kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan materil mereka.

Selanjutnya Chapra (2001) mengemukakan bahwa

Islam menjadi agama keseimbangan, dimana telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan urusan duniawi.²⁵

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan menjadi sebuah azab ataupun kutukan dari Tuhan. Akan tetapi disebabkan pemahaman manusia yang masih salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang telah diberikan.²⁶ Al-Qur'an telah menyinggungnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ مَن مِّنْ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

²⁵ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pengembangan Islam*, Ed. 01, Cet. 02, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23

²⁶ Ristek, *Sains & Teknologi 2: Berbagai Ide Untuk Menjawab Tantangan & Kebutuhan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 243

memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁷

Adanya perbedaan taraf hidup merupakan sebuah rahmat sekaligus juga “pengingat” bagi kalangan manusia yang lebih “berdaya” atau mampu untuk dapat saling membantu pada kalangan yang kurang mampu. Hal seperti inilah yang seharusnya ditanamkan pada kalangan umat Islam, untuk memiliki sikap empati dan simpati terhadap sesamanya haruslah di pupuk sejak dini.²⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ ذُوهُنَّ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا أَنْتُمْ
بِالرَّسُولِ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ (٧)

Artinya:

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.”²⁹

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan oleh sikap dan perilaku umat yang salah

²⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 491

²⁸ Ristek, *Sains & Teknologi 2: Berbagai Ide Untuk Menjawab Tantangan & Kebutuhan...*, hlm. 243

²⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah...*, hlm. 546

dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, terkhusus pada pemahaman mengenai kepemilikan harta kekayaan. Dengan begitu, apa yang kemudian telah disebutkan dalam teori sosiologi sebagai “kemiskinan absolut” sebenarnya tidaklah perlu terjadi apabila umat Islam dapat memahami secara tepat dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan pada Islam sendiri lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti halnya kemalasan, minimnya semangat kemandirian, serta lemahnya daya juang. Oleh karena itulah, dalam konsepsi pemberdayaan, yang menjadi titik beratnya bukan hanya pada sektor ekonomi (investasi, peningkatan pendapatan, dan lainnya) saja, akan tetapi juga pada faktor non-ekonomi. Konsepsi pemberdayaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran yang sangat maju, yang mana menitikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” saja seperti halnya dengan memberikan bantuan yang bersifat sementara (*temporer*).³⁰

c. Macam-Macam Kemiskinan

Menurut Chambers, kemiskinan bisa dipilah ke dalam empat gambaran, yang meliputi:

³⁰ Ristek, *Sains & Teknologi 2: Berbagai Ide Untuk Menjawab Tantangan & Kebutuhan...*, hlm. 243

- 1) Kemiskinan absolut: keadaan dimana pendapatan yang diperoleh membuatnya berada pada posisi di bawah garis kemiskinan, serta tidak dapat memadai dalam memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi kesehatan, pangan, sandang, papan dan juga pendidikan yang tentunya dibutuhkan agar dapat memiliki kehidupan yang layak dan bisa bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif: keadaan dimana kebijakan suatu pembangunan belum bisa mencapai masyarakat secara keseluruhan, dan akhirnya mendatangkan kesenjangan pendapatan yang mana membuat seseorang berada di bawah kemampuan yang dimiliki masyarakat di sekitarnya walaupun seseorang itupun masih dapat dikatakan hidup di atas garis kemiskinan.
- 3) Kemiskinan kultural: keadaan dimana seseorang ataupun sekelompok orang memiliki sikap yang menjadikannya berada pada kehidupan kemiskinan walaupun terdapat bantuan dari pihak luar untuk mereka, hal ini disebabkan oleh adanya faktor budaya seperti halnya mereka enggan untuk berusaha mengubah tingkat kehidupan mereka, bersikap malas, boros serta tidak kreatif.
- 4) Kemiskinan structural: keadaan dimana akses sumber daya yang rendah terjadi pada sistem sosial budaya dan politik yang tidak

berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, dan bahkan acapkali membuat kemiskinan bertambah subur.³¹

Kemiskinan merupakan keadaan yang serba kekurangan dikarenakan seseorang yang tidak bisa menghindari suatu kondisi dengan kekuatan yang dia punya, terkhusus kemiskinan pada perempuan. Jika dilihat dari pola waktu, maka kemiskinan bisa dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Persisten Poverty*, merupakan kemiskinan yang sudah parah atau turun temurun, yang biasanya terjadi di daerah dengan sumber daya alam yang kritis serta lokasi yang terisolasi dengan daerah yang lainnya.
- 2) *Cyclical Poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola masa ekonomi dengan keseluruhan.
- 3) *Seasonal Poverty*, merupakan kemiskinan dengan sifat musiman yang biasanya dialami oleh nelayan dan juga buruh tani tanaman yang musiman.
- 4) *Accidental Poverty*, merupakan kemiskinan yang terjadi akibat adanya bencana alam atau juga dikarenakan kebijakan pemerintah yang berakibat pada penurunan kesejahteraan.³²

³¹ Ali Khomsan dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin...*, hlm. 3

³² Alifiulahtin Utaminingsih dkk., *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis...*, hlm. 3

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Todaro (1997) menyatakan bahwa

Variasi kemiskinan pada negara berkembang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu Geografis; Jumlah penduduk dan Tingkat pendapatan; Sejarah; Kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya; Peranan sektor swasta dan negara; Struktur industri; Derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan Pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sedangkan Jhingan (2000) mengemukakan

Ada tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Yang pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan tingginya jumlah penduduk yang buta huruf dan tidak mempunyai ketrampilan maupun keahlian. Yang kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi yang buruk sehingga hanya sebagian kecil dari penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Yang ketiga yaitu penduduk terkonsentrasi pada sektor pertanian dan pertambangan yang menggunakan metode produksi yang telah usang dan juga ketinggalan zaman.³³

Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah PDRB, IPM dan Gini Ratio, seperti berikut ini:

1) PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah kunci dalam penurunan kemiskinan pada suatu wilayah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu meningkatkan

³³ Baiq Tisniwati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 01, Juni 2012, hlm. 36

kesejahteraan masyarakatnya, sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yaitu tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai bersih atas barang dan jasa akhir yang dihasilkan atau diproduksi dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

PDRB yang semakin tinggi pada suatu daerah, maka akan mengakibatkan semakin besarnya potensi sumber penerimaan pada daerah tersebut. Pada realitanya, PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja, dengan asumsi jika nilai PDRB meningkat maka juga akan meningkatkan jumlah nilai tambah output pada seluruh unit ekonomi suatu wilayah. Meningkatnya jumlah output tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta (pengangguran akan menurun) sehingga juga akan mengurangi angka kemiskinan.³⁴

2) IPM

Kualitas sumber daya manusia bisa menjadi faktor akibat terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

³⁴ I Made Parwata dkk., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan", *Jurnal Manajemen*, Vol. 4, 2016, hlm. 2

Mudrajad mengatakan bahwa

IPM memiliki manfaat dalam membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara ataupun antar daerah.

IPM sendiri adalah indikator yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk pada suatu wilayah memiliki kesempatan dalam mengakses hasil suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya untuk memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Masyarakat yang sehat serta berpendidikan baik, bisa meningkatkan produktifitas masyarakat yang mana juga akan meningkatkan pengeluaran dalam konsumsinya, jika pengeluaran dalam konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, IPM yang rendah akan berakibat pada produktifitas kerja penduduk yang juga rendah. Produktifitas yang rendah tersebut akan berakibat pada perolehan pendapatan yang rendah pula. Sehingga pendapatan yang rendah tersebut akan berakibat pada tingginya jumlah penduduk miskin.³⁵

3) Gini Ratio

Parameter yang sering dipakai dalam mengukur distribusi pendapatan ini yaitu Angka Gini Ratio atau yang juga sering disebut Indeks Gini atau lebih lengkapnya “Gini

³⁵ Rapidah Azmi, “Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu”, *Skipi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 40

Concentration Ratio”. Indeks Gini/Gini Ratio adalah salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan.³⁶

Menurut Basri

Distribusi pendapatan memperlihatkan mengenai merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan pada suatu negara dikalangan penduduknya.

Pembagian dari hasil pembangunan ekonomi sudah seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan penduduk pada suatu negara secara merata. Namun, ketimpangan distribusi pendapatan menghambat kalangan tertentu untuk dapat ikut serta dalam menikmati hasil pembangunan. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu inti dari masalah pembangunan, terutama pada negara yang sedang berkembang. Ketimpangan distribusi pendapatan mengakibatkan tingkat kemiskinan tetap tinggi meski pertumbuhan ekonomi sedang meningkat. Hal ini dikarenakan manfaat dari distribusi pendapatan hanya dikuasai oleh kalangan tertentu saja. Penduduk miskin tetap berada pada lingkaran kemiskinan dikarenakan mereka tidak memperoleh penambahan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.³⁷

³⁶ Heryanah, “Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Studi Empiris Berdasarkan SUSENAS 2008, 2011 dan 2013”, *Jurnal BPPK*, Vol. 10 No. 02, 2017, hlm. 45

³⁷ David Togar Hutagaol, “Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Se-Indonesia”, *Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 42

Tingginya pertumbuhan ekonomi haruslah disertai dengan meratanya distribusi pendapatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar pertumbuhan ekonomi bisa menurunkan angka kemiskinan. Meratanya distribusi pendapatan bisa memberi efek yang positif dalam meningkatkan pendapatan pada penduduk miskin. Penambahan pendapatan yang diterima bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas hidupnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan minimal mereka. Pemerataan distribusi pendapatan bisa menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan salah satu faktor yang harus diperhatikan yaitu distribusi pendapatan.³⁸

e. Penyebab Kemiskinan

Penyebab dalam kemiskinan sendiri menurut Cox memiliki sifat yang kompleks serta dibagi kedalam empat dimensi yang meliputi:

- 1) Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi, dimana dalam globalisasi negara majulah yang menjadi pemenangnya, dan negara berkembang tentunya akan kalah dan tersingkirkan dari persaingan pasar bebas. Oleh karena itulah jumlah kemiskinan yang ada pada negara berkembang akan jauh lebih banyak daripada di negara maju.

³⁸ *Ibid*, hlm. 43

- 2) Kemiskinan yang bersangkutan dengan pembangunan, dimana terdapat dampak dari suatu pembangunan itu sendiri yang mengakibatkan terciptanya kemiskinan pada daerah pedesaan bahkan juga perkotaan. Pada pedesaan, kemiskinan terjadi akibat adanya pembangunan yang meminggirkan daerah pada pedesaan. Sedangkan pada perkotaan, kemiskinan terjadi akibat kecepatan pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dicapai oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Kemiskinan sosial, dimana kemiskinan diakibatkan oleh kondisi sosial yang tidak dapat memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok masyarakat. Seperti halnya bias gender, diskriminasi dan juga eksploitasi ekonomi dapat menjadi kondisi sosial yang tidak menguntungkan.
- 4) Kemiskinan konsekuensial, dimana kemiskinan disebabkan oleh adanya faktor secara eksternal. Faktor eksternal tersebut bisa berupa konflik, bencana alam, lingkungan yang rusak, serta jumlah penduduk yang tinggi. Dari faktor-faktor itulah yang menjadi penyebab kemiskinan muncul dalam masyarakat.³⁹

Pada UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dikemukakan bahwa

³⁹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ed. 01, Cet. 01, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 12

penyebab atas kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini:

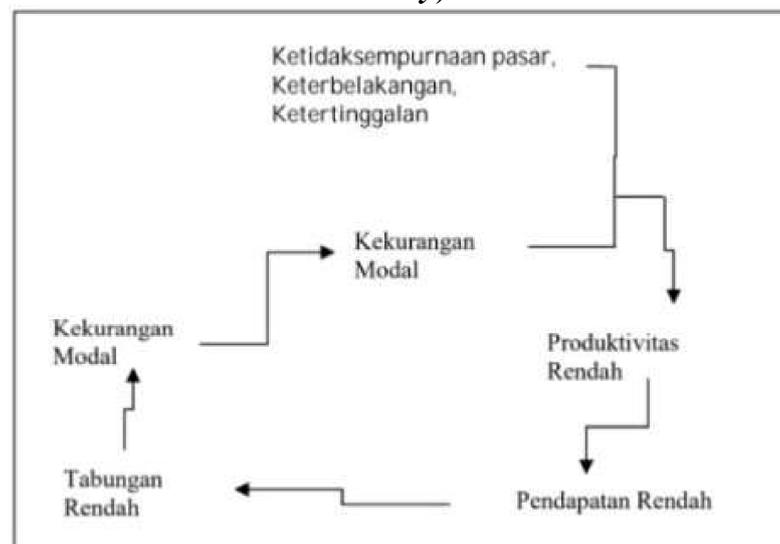
- 1) Kemiskinan kritis/kronis (*chronic poverty*), yang diakibatkan oleh sikap, kebiasaan, dan juga perilaku yang tidak produktif, akses yang terbatas pada sumber daya dan keterasingan, serta taraf pendidikan dan derajat kesehatan yang rendah dan juga lapangan kerja yang dapat diakses terbatas.
- 2) Kemiskinan sementara (*transient poverty*), yang diakibatkan oleh adanya perubahan masa ekonomi dari yang kondisinya normal hingga menjadi kritis ekonomi, perubahan yang memiliki sifat musiman dan terjadinya bencana alam ataupun juga imbas dari adanya kebijakan pemerintah.⁴⁰

Selain itu faktor penyebab kemiskinan juga terbagi menjadi tiga faktor. Yang pertama, secara mikro dimana kemiskinan muncul akibat adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, kemiskinan muncul dikarenakan adanya perbedaan pada kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kemiskinan muncul dikarenakan adanya perbedaan akses pada modal. Dari ketiga faktor penyebab yang menjadi latar belakang kemiskinan tersebut selanjutnya muncul teori lingkaran seta kemiskinan (*vicious circle*

⁴⁰ Alifiulahtin Utaminingsih dkk., *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis...*, hlm. 4

of poverty). Teori ini telah dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, dimana ia mengungkapkan bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” yang artinya negara miskin itu miskin karena dia miskin.⁴¹ Berikut ini dapat dilihat gambar bagan yang menjelaskan tentang lingkaran setan, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)⁴²



f. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu tantangan global bagi pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Dengan dibentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, setelah itu peraturan tersebut dilakukan perevisian

⁴¹ *Ibid*, hlm. 5

⁴² *Ibid*, hlm. 6

sehingga menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015. Pemerintah juga membuat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan juga lintas pemangku kepentingan yang ada pada tingkat pusat, dimana tujuannya adalah agar bisa mengimbangkan berbagai kegiatan dari percepatan penanggulangan kemiskinan. Program-program yang dilakukan yaitu meliputi: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas), Beras Miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).⁴³

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan pada suatu perekonomian yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang telah diproduksi pada suatu masyarakat mengalami penambahan. Masalah pada pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pada setiap periodenya kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Peningkatan pada kemampuan ini disebabkan oleh

⁴³ *Ibid*, hlm. 10

adanya beberapa faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan pada jumlah dan juga kualitasnya. Selain itu juga disebabkan investasi yang akan menambah jumlah barang modal dan perkembangan pada teknologi yang dipakai.⁴⁴

Bisa dikatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menjelaskan dan mengukur potensi dari perkembangan pada suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kegiatan perekonomian yang sebenarnya berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku pada suatu negara, seperti halnya penambahan dan jumlah produksi barang industri, bertambahnya jumlah sekolah, berkembangnya infrastruktur, penambahan produksi barang modal dan sektor jasa.⁴⁵

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan produk domestik bruto pada sebuah negara ataupun daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi bisa dilihat pada persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih besar dari periode sebelumnya.⁴⁶

Para ekonom memandang pertumbuhan ekonomi sebagai permasalahan dalam ekonomi makro dengan jangka panjang. Selain itu para ekonom juga sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai kenaikan output barang ataupun material serta jasa

⁴⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3, Cet. 23, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 9

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 423

⁴⁶ Alam S, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*, (Jakarta: Esis, 2007), hlm. 25

dengan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang digambarkan dengan bentuk kenaikan pendapatan nasional.⁴⁷

b. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan terus-menerus pertumbuhan dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi pada kesejahteraan manusia).⁴⁸

Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam haruslah memasukkan aspek aksiologis (nilai moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan pada kesejahteraan materi saja akan tetapi juga memasukkan aspek ruhaniyah. Dalam pandangan Islam, memasukkan aspek ruhaniyah ini tidak akan menimbulkan suatu masalah yang sistematis, hal ini karena sifatnya yang abstrak. Sebab yang dioptimalisasikan sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu neo-klasik, bukan merupakan arus konsumsi namun “nilai guna”

⁴⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 231

⁴⁸ Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 205

yang memiliki kaitan dengannya, yang ia sendiri merupakan kualitas yang tidak berwujud.⁴⁹

Muhammad Qal'ah Jey berpendapat dalam buku *Mahabits fi Al-Iqtishad al-Islamy*

Salam satu tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dalam hal ini terdapat sebuah pertanyaan besar yaitu, apakah yang menjadi prioritas pada pertumbuhan ekonomi itu pemerataan (*growth with equity*) atau justru pertumbuhan itu sendiri (*growth*). Dan yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu bahwa Islam membutuhkan kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (*growth*) ataupun pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan.⁵⁰

Pertumbuhan ekonomi yang dituju dalam ekonomi Islam adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materinya maupun juga rohaninya. Islam sendiri tidak memperbolehkan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas, yang memaksakan pengorbanan, serta yang tidak alamiah bagi manusia. Sehingga menurut Islam, tingkat pertumbuhan yang rendah jika diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata maka akan lebih baik dari pada tingkat pertumbuhan tinggi akan tetapi tidak diikuti dengan distribusi yang merata.⁵¹

c. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno

Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan ekonomi pemerintah, kestabilan politik, kekayaan alam yang dimiliki,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 213

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 213

⁵¹ *Ibid*, hlm. 213

jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih serta kemampuan dalam mengembangkan dan juga menggunakan teknologi yang modern. Adapun pandangan para ahli ekonomi mengenai faktor yang menjadi sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya; jumlah dan mutu para penduduk dan tenaga kerja; barang-barang modal dan tingkat teknologi; serta sistem sosial dan sikap para masyarakat.⁵²

d. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Total pada nilai tambah atas suatu barang ataupun jasa yang telah diproduksi pada wilayah tertentu dengan waktu tertentu pula serta tanpa melihat faktor kepemilikan merupakan definisi dari PDRB.⁵³ PDRB merupakan jumlah dari seluruh produk yang telah diproduksi dalam suatu daerah selama periode tertentu, yang mana nantinya sejumlah barang ataupun jasa yang diciptakan akan diukur dalam bentuk uang pada harga pasar yang tengah berjalan.

Dalam suatu wilayah dasar sebuah pengukuran dalam suatu nilai tambah yang telah dihasilkan atas munculnya berbagai aktifitas ekonomi adalah PDRB itu sendiri. Oleh sebab itulah besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan sungguh berpegang pada faktor produksi yang ada pada suatu daerah. Variasi pada PDRB yang ada pada daerah satu dengan lainnya, tidak lain adalah akibat adanya faktor produksi yang berbeda diantara masing-masing daerah. Kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengelola SDA

⁵² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 429

⁵³ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2017), hlm. 14

dan juga SDM yang ada dapat digambarkan pada data PDRB. Apabila SDA dan SDM dapat dikelola secara lebih baik dan tepat, maka tentunya dapat memberikan nilai tambah yang luar biasa besarnya. Selain itu PDRB juga bisa dipakai untuk mengetahui total nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi, sehingga nantinya dapat terlihat sektor mana sajakah yang ikut bertindak pada pembentukan perekonomian daerah. Dengan kata lain PDRB bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat besar kecilnya produksi atas barang dan jasa, baik secara dasar harga yang berlaku maupun secara dasar harga konstan.⁵⁴

Dasar penghitungan PDRB sendiri disajikan kedalam dua bentuk:

- 1) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dimana pada dasar penghitungan ini PDRB digambarkan pada total nilai tambah atas barang dan juga jasa yang telah diproduksi dengan penghitungan atas harga yang sedang berlaku pada tahun berjalan. Dalam hal ini PDRB ADHB berhubungan dengan dua aspek yang meliputi perkembangan produksi riil dan perkembangan harga atau inflasi.
- 2) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dimana pada dasar penghitungan ini PDRB digambarkan pada total nilai tambah

⁵⁴ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2018), hlm. 44

atas barang dan juga jasa yang telah diproduksi dengan penghitungan atas harga pada tahun dasar (satu tahun tertentu). Selain itu dalam PDRB ADHK ini bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan riil yang telah terbebaskan dari unsur kenaikan harga. Serta penyajian pada ADHK ini juga dapat menghitung pertumbuhan riil ekonomi.⁵⁵

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Pembangunan Manusia

UNDP (United Nation Development Programme) mengartikan bahwa

Pembangunan manusia sebagai sebuah proses dalam memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Pada konsep itulah penduduk diposisikan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) dan upaya pembangunan dianggap sebagai sarana (*principal means*) agar bisa mencapai tujuan tersebut.⁵⁶

Pembangunan manusia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga umur yang panjang. Yang menjadi tujuan akhir dari sebuah pembangunan adalah manusia itu sendiri. Memperluas pilihan-pilihan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu. Dalam hal ini terdapat dua

⁵⁵ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017...*, hlm. 15

⁵⁶ Santi Sari Dewi, *Hafal Mahir Geografi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), hlm. 321

sisi, dimana yang pertama adalah pembentukan kemampuan manusia, seperti halnya yang tergambar pada kesehatan, pengetahuan dan juga keahlian yang mengalami peningkatan. Lalu yang kedua adalah pemakaian kemampuan yang sudah dimiliki untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan, ataupun untuk aktif pada kegiatan kebudayaan, politik dan sosial. Paradigma pembangunan manusia disebut juga sebagai konsep holistik yang memiliki empat unsur penting, yaitu (1) peningkatan produktivitas, (2) kesinambungan pembangunan, (3) pemerataan kesempatan dan juga (4) pemberdayaan manusia. Konsep ini sendiri juga digagas dan ditunjang UNDP, yang mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).⁵⁷

b. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Satu diantara yang ada pada indikator yang dipakai dalam melihat kesuksesan usaha dalam pembangunan kualitas kehidupan manusia serta sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada pembangunan manusia yaitu merupakan IPM. IPM merupakan indeks komposit dari adanya indeks kesehatan, indeks pendidikan dan juga indeks pengeluaran atau daya beli. Keseluruhan indeks tersebut diukur dari hal-hal yang berbeda, dimana indeks kesehatan yang berasal dari rata-rata angka harapan hidup, indeks

⁵⁷ Iswan Kaputra dkk., *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Pemerintah Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 81

pendidikan yang berasal dari rata-rata lamanya bersekolah atau angka harapan lamanya bersekolah, indeks daya beli yang berasal dari tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. Didalam IPM sendiri dijelaskan mengenai akses penduduk yang berkenaan dengan hasil pembangunan dalam mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pada tahun 1990 UNDP memperkenalkan IPM dan memublikasikannya secara teratur didalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.⁵⁸

Prinsip dari adanya strategi pembangunan adalah dengan berorientasi pada kenaikan kualitas hidup masyarakat agar dapat dicapainya hasil pembangunan yang merata dan adil. Maka dari itu harus ada usaha lebih agar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkualitas dapat tercapai. Salah satu indikator penting yang bisa dipakai dalam mengetahui usaha serta kinerja program pembangunan secara keseluruhan pada suatu daerah yaitu IPM. Besaran IPM sendiri juga dapat mengukur dan menunjukkan kemajuan dari program pembangunan pada awal dan akhir periode tersebut. IPM menjadi patokan dalam mengetahui dampak kinerja dari pembangunan suatu daerah yang memiliki dimensi yang sangat luas, hal ini dikarenakan IPM menunjukkan kualitas penduduk pada

⁵⁸ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018...*, hlm. 13

wilayah tertentu yang berkenaan dengan harapan hidup, intelektualitas, serta standar hidup yang layak.⁵⁹

Angka IPM sendiri berada pada kisaran di antara 0 sampai dengan 100. Jika semakin mendekati angka 100, maka artinya adalah indikasi pembangunan manusia semakin baik. Berdasar pada nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia dari suatu negara ataupun wilayah ke dalam tiga golongan berikut ini:

- 1) $IPM < 50$ (rendah)
- 2) $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah)
- 3) $IPM \geq 80$ (tinggi)

Rumus umum yang digunakan IPM yaitu sebagai berikut ini:

$$IPM = \frac{1}{3}(Y1 + Y2 + Y3)$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y_1 = Indeks Harapan Hidup

Y_2 = Indeks Pendidikan

Y_3 = Indeks Standart Hidup Layak⁶⁰

⁵⁹ Tranggono Dibjoharsosno, *Data dan Statistik Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2019*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2019), hlm. 11

⁶⁰ Surya Dewi Rustariyuni, "Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012", *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. 01 No. 01, Juli 2014, hlm. 49

c. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Dalam tingkat keberhasilan suatu pembangunan manusia terdapat tiga komponen IPM yang menjadi pengaruhnya yang meliputi:

- 1) Komponen kesehatan, dimana komponen ini dicerminkan pada usia harapan hidup manusia dengan rata-rata prediksi banyaknya tahun yang dijalani oleh seseorang semasa hidupnya. Terdapat dua macam data yang dipakai untuk menghitung angka harapan hidup meliputi anak lahir hidup dan anak masih hidup. Dalam penghitungan indeks harapan hidup yaitu menggunakan angka tertinggi 85 tahun dan 25 tahun untuk yang terendah, dimana hal tersebut disesuaikan dengan standar UNDP.
- 2) Komponen pendidikan, dimana komponen ini dicerminkan oleh angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah. Usia pada angka melek huruf adalah 15 tahun keatas dengan kemampuan membaca dan menulis. Dengan batas maksimum 100 dan minimum 0 sesuai standar UNDP. Sedangkan pada rata-rata lamanya bersekolah adalah dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam semua jenis pendidikan formal yang pernah dilalui, dengan batas maksimum 15 tahun dan minimum 0 tahun sesuai standar UNDP.
- 3) Komponen daya beli, dimana komponen ini dicerminkan oleh pendapatan per kapita riil yang telah sesuai. Dimana didalamnya

meliputi rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang telah dibakukan dengan pendeflasikasian lewat indeks harga konsumen.⁶¹

d. Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, indeks pembangunan manusia disebut dengan I-HDI (*Islamic Human Development Index*). Dimana I-HDI merupakan alat yang dipakai untuk mengukur pembangunan manusia dengan perspektif Islam. I-HDI ini melakukan pengukuran terhadap pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan (*masalahah*) yang menjadi dasar agar manusia bisa hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat.⁶²

Menurut al-Syatibi

Maslahah dasar bagi manusia itu terdiri atas lima hal yaitu meliputi, agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Dari kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak yang haruslah dipenuhi agar manusia bisa hidup bahagia dunia dan juga akhirat. Apabila salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi namun dengan tidak seimbang, niscaya hidup juga tidak akan tercapai dengan sempurna.⁶³

Pembangunan manusia merupakan program yang selalu ada untuk diimplementasikan dalam menyiapkan kualitas manusia yang baik untuk dapat mengisi sektor-sektor yang dapat menguntungkan

⁶¹ M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin...", hlm. 117-118

⁶² A. Alif Nafilah K., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2014", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), hlm. 21

⁶³ *Ibid*, hlm. 21

dan juga menghasilkan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan serta persiapan yang matang dan berkelanjutan, sehingga bisa mencapai suatu hasil dan tujuan yang telah diperhitungkan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa keadilan sosial dan demokrasi (permusyawaratan) merupakan konsep Islam yang penting. Pembangunan sendiri merupakan suatu kewajiban agama. Bukan hanya aspek-aspek tertentu agama Islam yang diajarkan, akan tetapi juga berkaitan dengan keharusan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Istishlah atau kebaikan/kemaslahatan bagi manusia merupakan pilar pembangunan manusia. Pada Al-Qur'an sendiri secara eksplisit memberikan penjelasan tentang larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh manusia harus memperhatikan pilar ini. Dalam pelaksanaannya pilar bangunan ini hanya memberikan dua rambu antara halal dan juga haram, yang mana masing-masing mempunyai konsekuensi berupa pahala atau dosa.⁶⁴

Dalam Islam manusia terdiri atas dua potensi yang harus dibangun, yaitu secara lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan juga secara ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi tersebut. Islam memandang tinggi mengenai masalah sumber daya manusia

⁶⁴ As'ad Bukhari, "Islam Dan Pembangunan Manusia Di Era Globalisasi", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 05 No. 01, Juni 2016, hlm. 6

khususnya yang berkaitan dengan akhlak (seperti sikap, pribadi, etika dan moral). Dalam kualitas manusia sendiri menyangkut banyak aspek seperti halnya aspek perilaku, aspek sikap mental, aspek kemampuan, aspek agama, aspek intelegensi, aspek kesehatan, aspek hukum dan lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh ruhaniyah yang mana bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Agar bisa mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka usaha yang paling utama adalah dengan memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, hal ini dapat diambil contoh seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhaniyah.⁶⁵

4. Gini Ratio

a. Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Masalah ketimpangan pendapatan atau biasa disebut dengan kesenjangan baik yang terjadi di antara individu, kelompok, rumah tangga, sektor maupun wilayah, adalah masalah yang selalu ada pada setiap negara, termasuk juga Indonesia. Bisa dikatakan tidak mungkin jika dalam suatu negara pendapatan penduduknya itu semuanya sama besar. Ketimpangan sendiri terjadi juga diakibatkan karena adanya perbedaan umur, jenis kelamin, pendidikan, lapangan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Tidak dapat dihindarinya

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 7

ketimpangan pendapatan, bukan berarti juga boleh dibiarkan terus menerus tinggi. Jika ketimpangan tinggi maka bisa memberikan dampak buruk pada kestabilan ekonomi dan juga kestabilan politik. Oleh sebab itulah diperlukan upaya agar ketimpangan yang terjadi tidak terlalu mencolok, bahkan jika bisa perkembangan yang terjadi pada ketimpangan sebisa mungkin jangan sampai mengalami pembesaran.⁶⁶

Pendapatan yang berbeda diantara orang kaya, menengah dan miskin bisa kita jumpai hampir di setiap negara. Akibat dari tidak meratanya pendapatan tersebut, mengakibatkan timbulnya ketimpangan yang dari satu negara dengan negara yang lainnya. Mekanisme pasar tidaklah selalu baik dalam pendistribusian pendapatan secara merata.⁶⁷

b. Ketimpangan Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Masalah mengenai ketimpangan distribusi pendapatan juga tidak lepas dari pembahasan serta objek permasalahan yang dibahas dalam ekonomi Islam. Dalam sudut pandang ekonomi Islam mengenai ketimpangan pendapatan yang hebat serta ketidakadilan ekonomi dikarenakan oleh ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi (memakai sistem bunga dan spekulasi finansial). Terjadinya ketimpangan pada negara

⁶⁶ Arief Daryanto dan Yundy Hafizrianda, *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Cet. 2, (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 196

⁶⁷ Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Ed. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 102

berkembang adalah dikarenakan kegagalan sistem kapitalisme. Ekonomi kapitalis sendiri dianggap sebagai faktor yang banyak mempunyai kekeliruan serta kesalahan pada sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan dimensi moral dan etika.⁶⁸

Suatu sistem perekonomian yang tidak seimbang akan menciptakan suatu sederetan panjang atas keinginan yang tidak dijamin, menanamkan dalam diri manusia sifat iri dan dengki, mempertajam nafsu untuk memperoleh kebendaan, membuat mereka lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mengindahkan moral, dan hal yang demikian merupakan sumber utama ketidakadilan yang ada dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Islam percaya bisa mengikis akar ketidakadilan dari pada hanya sekedar meringankan beberapa gejala. Islam memasukkan ke dalam keimanannya beberapa tindakan yang tidak memperbolehkan sebuah distribusi yang tidak adil. Selain itu juga, Islam mempunyai sebuah program yang telah terpasang untuk mengurangi ketidakadilan yang masih ada atau tersisa dengan melakukan pembayaran zakat, serta dengan beberapa metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan.⁶⁹

⁶⁸ Hanifa Yuni Lestari, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Malang 2002-2016", *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 20

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 21

Dalam ajaran Islam selalu mengedepankan etos kerja yang merupakan bagian dari prinsip kehidupan sebagai implementasi dari keimanan. Setiap negara haruslah menjamin setiap warganya dapat hidup dengan layak, salah satu upayanya adalah dengan menerapkan keadilan pada bidang ekonomi yaitu persamaan hak untuk bisa memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Iklim pasar bebas yang tidak sehat juga bisa menjadi akibat melebarnya kesenjangan, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya gini rasio. Islam sendiri melarang adanya ketimpangan dan menekankan pada keadilan.⁷⁰ Hal ini seperti yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al- Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya:

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.”⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 22

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah...*, hlm. 546

c. Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan, yaitu meliputi:

- 1) Kemampuan: dimana jika kemampuan alami yang ada tidak merata tentunya pendapatan didistribusikan secara tidak merata, seperti halnya beberapa artis yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan artis atau seniman yang lainnya.
- 2) Modal manusia: dimana individu menambahkan kemampuan yang mereka miliki dengan melalui pendidikan ataupun pelatihan agar nantinya bisa memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Disini tidaklah semua orang bisa mencapai tingkat yang sama atau setara dari sumber daya manusia, sehingga hal ini berakibat pada tidak meratanya pendapatan.
- 3) Diskriminasi: meskipun termasuk kemajuan dalam fungsi sosial, diskriminasi ini merupakan rintangan yang kemungkinan tidak bisa diatasi bahkan pada kemampuan tingkat tinggi dan juga adanya modal manusia.
- 4) Preferensi: dimana beberapa orang yang bahkan mempunyai kemampuan tinggi dan juga modal manusia lebih memilih untuk memaksimalkan utilitas dengan cara memperbanyak waktu luang dengan sedikit tenaga kerja.
- 5) Kekuatan Market: dimana adanya monopoli dan juga pasar monopsoni yang bisa merugikan konsumen dan juga pekerja.

Apabila semakin banyak kekuatan pasar berada pada tangan segelintir orang, maka akan semakin membuat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

- 6) Keberuntungan dan koneksi: dimana beberapa orang terkadang dilahirkan dengan keadaan yang sudah beruntung dan cukup, akan tetapi justru terjerumus pada koneksi yang justru kurang tepat.⁷²

d. Pengertian Ratio Gini

Ratio Gini atau Koefisien gini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.⁷³ Konsep Gini Ratio yang memperlihatkan adanya hubungan di antara jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seluruh individu ataupun keluarga dengan total pendapatan telah dikenalkan oleh Corrado Gini. Sebagai ukuran pemerataan pendapatan, ukuran pada Gini Ratio memiliki rentang nilai di antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai Gini Ratio yang dimiliki mendekati nol maka artinya hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang terjadi rendah, namun jika nilai Gini Ratio yang dimiliki mendekati satu maka artinya hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang terjadi tinggi. Dalam

⁷² Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro...*, hlm. 103

⁷³ M. Chairul Arifin, *Kamus & Rumus Peternakan Dan Kesehatan Hewan*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Gita Pustaka, 2018), hlm. 95

menghitung nilai Gini Ratio sendiri terdapat rumus sebagai berikut.⁷⁴

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1} - 1)}{10000}$$

Keterangan:

G : Gini Ratio

P_i : Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas

K : Banyaknya kelas pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisaran di antara nol (pemerataan sempurna), sampai dengan satu (ketimpangan sempurna). Dalam prakteknya sendiri Koefisien Gini pada negara-negara yang memiliki derajat ketimpangan tinggi nilainya berkisaran di antara 0,50 sampai dengan 0,70, negara dengan ketimpangan sedang memiliki nilai yang berkisaran di antara 0,36 sampai dengan 0,49 sedangkan untuk negara yang memiliki distribusi pendapatan yang relatif merata nilainya berkisaran di antara 0,20 sampai dengan 0,35.⁷⁵

⁷⁴ Ika Tumiarsih, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur", *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2019), hlm. 24

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 24

Achjar mengemukakan bahwa

Gini Ratio masih mempunyai keterbatasan apabila dipakai dalam menentukan ketimpangan pendapatan. Kekurangan yang dimaksud seperti halnya keterbatasan dalam memperlihatkan ketimpangan pendapatan, di antara lain yaitu Gini Ratio yang tidak bisa didekomposisikan, tidak bisa menangkap konsentrasi pendapatan berdasarkan lokasi atau ruang, dan tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan daerah lain. Gini Ratio secara garis besar memang memperlihatkan ketidakmerataan pendapatan yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak bisa memperlihatkan di manakah ketimpangan itu terjadi.⁷⁶

B. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang membahas mengenai kemiskinan yang ada pada beberapa daerah dengan rentang periode waktu yang berbeda-beda, antara lain meliputi:

1. Susanti (2013)⁷⁷ dengan judul penelitian “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”.

Dimana PDRB, pengangguran dan IPM menjadi variabel independennya, dan kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi linier panel data. Dalam penelitian ini menampakkan hasil bahwa PDRB dan pengangguran masing-masing terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap

⁷⁶ Soekarwo, *Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2018), hlm. 40

⁷⁷ Sussy Susanti, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”, *Jurnal Matematika Integratif*, Vol. 09 No. 01, 2013, hlm. 12

kemiskinan, dan IPM terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan PDRB, pengangguran dan IPM secara bersama terdapat pengaruh simultan terhadap kemiskinan sebesar 99,7 persen.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Susanti terletak pada variabelnya, di mana variabel Susanti menggunakan pengangguran sebagai salah satu variabel Xnya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan Gini Ratio. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan PDRB dan IPM. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan kemiskinan sebagai variabel Ynya. Selain itu juga pada penelitian saya juga menggunakan metode yang sama yaitu metode analisis regresi data panel.

2. Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018)⁷⁸ dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”.

Dimana IPM, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis jalur (*path analysis*). Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menampilkan hasil yang berbeda-beda, dimana IPM terdapat pengaruh

⁷⁸ Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06 No. 02, 2018, hlm. 228

signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, lalu pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengangguran terdapat pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Prasetyoningrum dan Sukmawati menggunakan tambahan pengangguran sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan Gini Ratio. Lalu metode yang dipakai juga berbeda, dimana pada penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) sedangkan pada penelitian saya menggunakan metode analisis regresi data panel. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan IPM dan juga pertumbuhan ekonomi dengan PDRB. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya.

3. Akbar (2019)⁷⁹ dengan judul penelitian “Pengaruh Dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2012-2016)”.

Dimana dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya.

⁷⁹ Azzam Ahmad Ali Akbar, “Pengaruh Dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2012-2016)”, *Jurnal Ilmiah*, hlm. 5

Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menunjukkan hasil yang berbeda-beda, dimana Dana ZIS terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, lalu PDRB dan IPM masing-masing terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Gini Ratio terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan Dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 50,3%.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Akbar terletak pada variabel X yang digunakan, dimana pada penelitian Akbar menggunakan empat variabel X dengan tambahan dana ZIS, sedangkan pada penelitian saya hanya menggunakan tiga variabel X. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan PDRB, IPM dan Gini Ratio. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya. Selain itu metode yang dipakai juga sama, dimana menggunakan metode analisis regresi data panel.

4. Nurwani (2017)⁸⁰ dengan judul penelitian “Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”.

⁸⁰ Hastina Febriaty Nurwani, “Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, *QE Journal*, Vol. 06 No. 03, Desember 2017, hlm. 178

Dimana Gini Ratio, PDRB perkapita dan tingkat Inflasi menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini menampakkan hasil bahwa Gini Ratio dan PDRB perkapita masing-masing terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Inflasi terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan Gini Ratio, PDRB perkapita dan tingkat Inflasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Nurwani terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Nurwani menggunakan tambahan tingkat inflasi sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan IPM. Selain itu variabel PDRB yang digunakan juga berbeda dimana Nurwani menggunakan PDRB perkapita sedangkan saya menggunakan PDRB. Lalu metode yang dipakai juga berbeda, dimana pada penelitian Nurwani menggunakan metode analisis regresi linear berganda, sedangkan pada penelitian saya menggunakan metode analisis regresi data panel. Persamaannya terletak pada variabel X nya yang lain yaitu menggunakan Gini Ratio. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya.

5. Sari dan Sa'roni (2020)⁸¹ dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan”.

Dimana pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan dan pengangguran menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menampakkan hasil yang sama, dimana pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan dan pengangguran masing-masing terdapat pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan secara simultan pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan dan pengangguran terdapat pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan sebesar 27,33%.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Sari dan Sa'roni terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Sari dan Sa'roni menggunakan tambahan pertumbuhan penduduk dan pengangguran sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan PDRB dan IPM. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan ketimpangan pendapatan dengan Gini Ratio. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya.

⁸¹ Yolanda Mahrita Sari dan Chairul Sa'roni, “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 03 No. 02, 2020, hlm. 573

Selain itu metode yang dipakai juga sama, dimana menggunakan metode analisis regresi data panel.

6. Mubyarto (2013)⁸² dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Kondisi Awal Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia Periode 2007-2011”.

Dimana dana pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kondisi awal daerah menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini menampakkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan masing-masing terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan, sedangkan awal pertumbuhan ekonomi, awal distribusi pendapatan dan awal kemiskinan masing-masing terdapat pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan pada periode berikutnya. Secara simultan semua variabel independen terdapat pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan sebesar 69,93%.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Mubyarto terletak pada variabel X yang digunakan, dimana pada penelitian Mubyarto menggunakan tambahan kondisi awal daerah sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan IPM.

⁸² Novi Mubyarto, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Kondisi Awal Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia Periode 2007-2011”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi-Sosial dan Teknologi*, Vol. 06 No. 01, April 2013, hlm. 18

Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi dengan PDRB dan distribusi pendapatan dengan Gini Ratio. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya. Selain itu metode yang dipakai juga sama, dimana menggunakan metode analisis regresi data panel.

7. Putro dkk (2017)⁸³ dengan judul penelitian “Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan”.

Dimana pengeluaran pemerintah, IPM, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel independennya, dan sekaligus juga pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis jalur (*path analysis*). Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menampilkan hasil yang berbeda-beda, dimana pengeluaran pemerintah dan IPM masing-masing terdapat pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak terdapat pengaruh signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pendapatan masing-masing tidak terdapat pengaruh signifikan secara langsung terhadap kemiskinan, sedangkan IPM dan pertumbuhan ekonomi masing-masing terdapat pengaruh negatif secara langsung dan

⁸³ Pilipus Bambang Wahyono Putro dkk., “Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 13 No. 02, 2017, hlm. 122

signifikan terhadap kemiskinan. Lalu pengeluaran pemerintah terdapat pengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan IPM dan ketimpangan pendapatan masing-masing terdapat pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Putro dkk terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Putro dkk menggunakan empat variabel X dengan tambahan pengeluaran pemerintah, sedangkan pada penelitian saya hanya menggunakan tiga variabel X. Lalu metode yang dipakai juga berbeda, dimana pada penelitian Putro dkk menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) sedangkan pada penelitian saya menggunakan metode analisis regresi data panel. Selain itu variabel Y yang digunakan pada penelitian Putro dkk menggunakan dua variabel Y yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai tambahannya, sedangkan pada penelitian saya hanya menggunakan satu variabel Y. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan IPM, ketimpangan pendapatan dengan Gini Ratio dan pertumbuhan ekonomi dengan PDRB. Untuk salah satu variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan kemiskinan sebagai variabel Y nya.

8. Tubaka (2019)⁸⁴ dengan judul “Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia”.

⁸⁴ Saddam Tubaka, “Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 08 No. 01, Desember 2019, hlm. 119

Dimana pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan menjadi variabel independennya, dan kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menampakkan hasil yang sama, dimana pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan masing-masing terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terdapat pengaruh terhadap kemiskinan sebesar 99,31%.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Tubaka terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Tubaka menggunakan pengangguran, pendidikan dan kesehatan sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan IPM. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi dengan PDRB dan distribusi pendapatan dengan Gini Ratio. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan kemiskinan sebagai variabel Y nya. Selain itu metode yang dipakai juga sama, dimana menggunakan metode analisis regresi data panel.

9. Nabila (2015)⁸⁵ dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”.

Dimana PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menampilkan hasil yang berbeda-beda, dimana PDRB terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, lalu IPM terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 96,45%.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Nabila terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Nabila menggunakan tambahan tingkat pengangguran sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan Gini Ratio. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan PDRB dan IPM. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana

⁸⁵ Hana Ainin Nabila, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”, *Jurnal Ilmiah*, Agustus 2015, hlm. 4

menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya. Selain itu metode yang dipakai juga sama, dimana menggunakan metode analisis regresi data panel.

10. Segoro dan Pou (2016)⁸⁶ dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012”.

Dimana PDRB, Inflasi, IPM, dan pengangguran menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen menampilkan hasil yang berbeda-beda, dimana PDRB dan Inflasi masing-masing tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, lalu IPM terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengangguran terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan PDRB, Inflasi, IPM, dan pengangguran terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebesar 39,1%.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Segoro dan Pou terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Segoro dan Pou menggunakan tambahan Inflasi dan pengangguran sebagai variabel X

⁸⁶ Waseso Segoro dan Muhamad Akbar Pou, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012”, *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 06 No. 01, 2016, hlm. 30

nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan Gini Ratio. Lalu metode yang dipakai juga berbeda, dimana pada penelitian Segoro dan Pou menggunakan metode analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian saya menggunakan metode analisis regresi data panel. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan PDRB dan IPM. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya.

11. Andykha dkk (2018)⁸⁷ dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”.

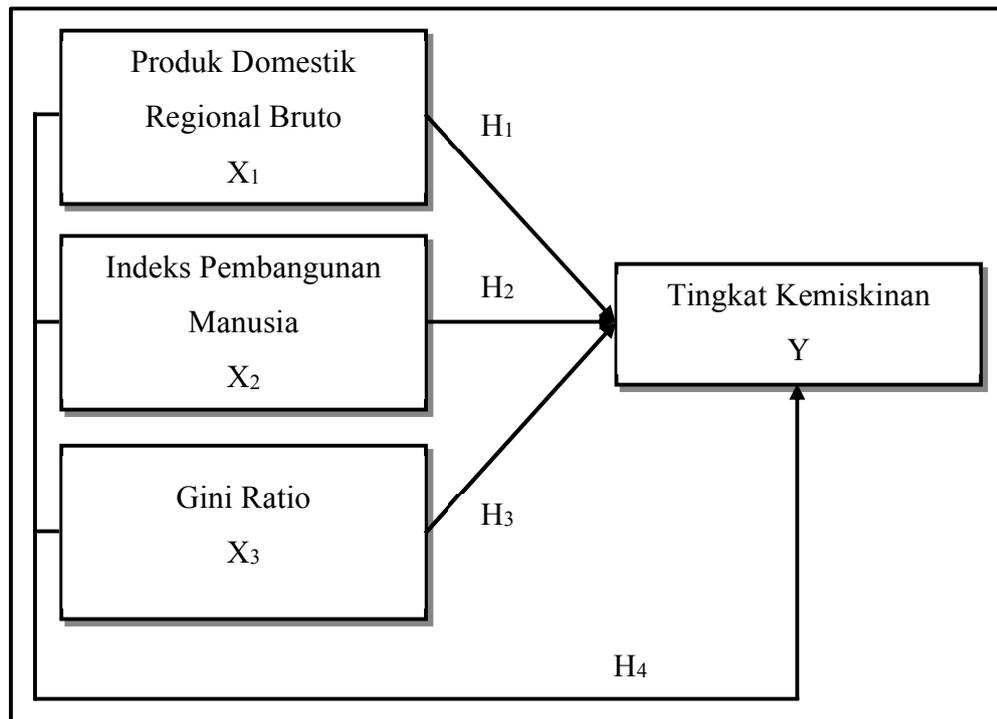
Dimana PDRB, tingkat pengangguran dan IPM menjadi variabel independennya, dan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependennya. Metode yang dipakai yaitu metode analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini menampakkan hasil bahwa PDRB dan pengangguran masing-masing terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan PDRB, tingkat pengangguran dan IPM terdapat pengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 98,1%.

⁸⁷ Ridho Andykha dkk., “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33 No. 02, Juli 2018, hlm. 116

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Andykha dkk terletak pada variabel X yang digunakan, dimana Andykha dkk menggunakan tambahan tingkat pengangguran sebagai variabel X nya, sedangkan saya tidak menggunakannya melainkan menggunakan Gini Ratio. Persamaannya terletak pada variabel X yang lain yaitu menggunakan PDRB dan IPM. Untuk variabel Y yang digunakan yaitu sama, dimana menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y nya. Selain itu metode yang dipakai juga sama, dimana menggunakan metode analisis regresi data panel.

C. Kerangka Konseptual

Peneliti mengemukakan pada penelitian ini dengan variabel PDRB sebagai (X_1), variabel IPM sebagai (X_2), dan Gini Ratio sebagai (X_3) yang mana akan mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel (Y). Pada penelitian ini mencari adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel yang terkait di mana variabel dependen nya yaitu Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang akan di prediksi dengan adanya pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri atas PDRB, IPM, dan Gini Ratio, yang mana diprediksi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan begitu dapat dirumuskan kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Kerangka konseptual tersebut didasarkan pada teori dan hasil kajian penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh PDRB (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) secara teori didasarkan dengan pendapat dari Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)⁸⁸ yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk mengetahui keberhasilan dalam pembangunan serta merupakan syarat keharusan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang menjadi syarat kecukupannya ialah di mana pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki keefektifan dalam mengurangi

⁸⁸ Ridzky Giovanni, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 07 No. 01, 2018, hlm. 30

tingkat kemiskinan. Serta didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putro dkk (2017)⁸⁹.

2. Pengaruh IPM (X₂) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) secara teori didasarkan dengan pendapat dari Mulyaningsih (2008)⁹⁰ yang menyatakan bahwa IPM memiliki tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu meliputi aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur, dan hidup sehat, untuk memperoleh pengetahuan dan memiliki akses kepada sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup. Peningkatan pada aspek tersebut akan memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga jika kualitas manusia semakin tinggi pada suatu daerah maka akan mengurangi kemiskinan. Serta didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanti (2013)⁹¹, Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018)⁹², Putro dkk (2017)⁹³, Nabila (2015)⁹⁴, Segoro dan Pou (2016)⁹⁵ dan Andykha dkk (2018)⁹⁶.

⁸⁹ Pilipus Bambang Wahyono Putro dkk., “Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan...”, hlm. 124

⁹⁰ Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, “Pengaruh Indeks Pembangunan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 06 No. 02, Oktober 2016, hlm. 246

⁹¹ Sussy Susanti, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia...”, hlm. 12

⁹² Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)...”, hlm. 232

⁹³ Pilipus Bambang Wahyono Putro dkk., “Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan...”, hlm. 124

⁹⁴ Hana Ainin Nabila, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia...”, hlm. 11

⁹⁵ Waseso Segoro dan Muhamad Akbar Pou, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)...”, hlm. 31

⁹⁶ Ridho Andykha dkk., “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan...”, hlm. 120

3. Pengaruh Gini Ratio (X_3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) secara teori didasarkan dengan pendapat dari Sugiyarto (2015)⁹⁷ yang menyatakan bahwa ketimpangan dan kemiskinan memiliki hubungan yang pragmatis dimana ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau dengan arti lain ketimpangan merupakan bentuk dari kemiskinan. Seperti juga yang diungkapkan oleh Ganie-Rochman (2013)⁹⁸ dimana statistik yang memperlihatkan ketimpangan yang memburuk sejalan dengan statistik yang memperlihatkan kemiskinan yang cenderung meningkat. Serta didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akbar (2019)⁹⁹, Sari dan Sa'roni (2020)¹⁰⁰ dan Mubyarto (2013)¹⁰¹.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban sementara dalam menanggapi suatu masalah yang dibahas pada sebuah penelitian mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana selanjutnya harus

⁹⁷ Khoirun Nisa dkk., "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 15 No. 01, April 2020, hlm. 57

⁹⁸ Gek Ayu Nina dan Surya Dewi Rustariyuni, "Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali", *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18 No. 02, November 2018, hlm. 129

⁹⁹ Azzam Ahmad Ali Akbar, "Pengaruh Dana ZIS, PDRB, IPM dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan...", hlm. 9

¹⁰⁰ Yolanda Mahrita Sari dan Chairul Sa'roni, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan...", hlm. 579

¹⁰¹ Novi Mubyarto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Kondisi Awal Daerah...", hlm. 18

dilakukan pengujian kembali secara empiris.¹⁰² Dari kajian pustaka yang sudah diutarakan sebelumnya, maka peneliti mencoba menguraikan hipotesis yang akan dilakukan pengujian untuk kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. H₁: Diduga terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.
2. H₂: Diduga terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.
3. H₃: Diduga terdapat pengaruh Gini Ratio yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.
4. H₄: Diduga terdapat pengaruh secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019.

¹⁰² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendika, 2019), hlm. 133